KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : ABU-ABU PELUNCURAN BURSA KRIPTO DI INDONESIA
Tanggal : Sabtu, 02 April 2022
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 14

| ASET KRIPTO |

ABU-ABU PELUNCURAN BURSA KRIPTO DI INDONESIA

Peluncuran bursa aset kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia belum dapat dipastikan waktu pelaksanaannya, meskipun Bappebti selaku regulator mengeklaim tidak ada kendala yang menghalangi.

Yustinus Andri & Nyoman Ary Wahyudi
redaksi@bisnis.com

Penantian para investor dan pedagang (*exchanger*) aset kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia untuk menjajal bursa komoditas tersebut, tampaknya harus tertunda hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sempat mengupayakan agar peluncuran bursa kripto dapat dilakukan pada akhir 2021. Namun, upaya itu belum dapat dilakukan, sehingga diperkirakan bursa tersebut meluncur pada kuartal I/2022.

Namun, hingga tanggal terakhir pada kuartal I/2022 tiba, yakni Kamis (31/2), 'hilal' mengenai peluncuran bursa aset kripto tak kunjung muncul. Sekadar informasi, PT Digital Futures Exchange (DFX) telah terpilih menjadi calon penyelenggara bursa kripto di Indonesia.

Adapun dalam proses pembentukan bursa kripto, pemerintah mengacu pada Peraturan Bappebti No. 8/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya meminta para investor dan pedagang kripto untuk menunggu proses penyelesaian pembentukan bursa kripto.

"Ditunggu saja sampai dengan prosesnya selesai," katanya kepada *Bisnis*, Kamis (31/3).

Dia pun tidak menyebutkan perkiraan waktu meluncurnya bursa kripto di Tanah Air. Menurutnya, peluncuran bursa kripto akan dilakukan apabila kelengkapan persyaratan seperti infrastruktur penunjang, kliring berjangka dan kustodi telah dipenuhi.

Di sisi lain, Tirta mengklaim, sejauh ini Bappebti tidak mengalami kendala apapun dalam membentuk bursa kripto.

"Dari kami, sejauh ini tidak ada [kendala]," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam sesi rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR pada Kamis (24/3), Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengaku tengah melakukan evaluasi terkait dengan jumlah pedagang dan koin kripto yang diakui. Adapun, sejauh ini di Indonesia, terdapat 17 pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Ilustrasi aset kripto Bitcoin, Ether, dan Altcoin.

Menurut Wisnu, kehadiran bursa kripto di Indonesia bisa membantu memperkuat nilai tukar rupiah.

"Transaksi Rp859 triliun kalau tidak ada *exchanger* di Indonesia, anak muda mau main di mana? Pasti di luar negeri. Tidak bisa pakai rupiah, harus cari dolar AS. Berarti Rp859 triliun akan menjadi dolar AS, [dan] rupiah akan melemah," tuturnya.

Berdasarkan data Bappebti, transaksi aset kripto mencapai Rp859,4 triliun pada 2021 atau naik 1,222,8% dari tahun 2020 yang masih Rp64,9 triliun. Adapun selama Januari-Februari 2022, transaksi aset kripto telah mencapai Rp83,8 triliun dengan jumlah pelanggan 12,4 juta investor, meningkat dari 2021 yang sebanyak 11,2 juta.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan kehadiran bursa akan memberikan kepastian bagi pedagang dan investor aset kripto sekaligus menepis keraguan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu basis investor kripto paling kuat di dunia. Menurut Laporan Digital 2022 Global Overview, Indonesia menempati peringkat ke-7 dengan tingkat kepemilikan kripto sebesar 15,4%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rerata kepemilikan global sebesar 10,4%.

Pembentukan bursa nantinya juga mempercepat proses pelaporan antara pedagang kripto dengan Bappebti sekaligus meningkatkan kepercayaan investor hingga memudahkan pengaturan pajak.

Selain itu, keberadaan lembaga kustodian dan kliring diyakini akan membuat jumlah investor meningkat pesat karena akan muncul kepercayaan masyarakat.

"Tentu, kita tidak mau kehilangan potensi industri kripto dalam negeri karena masyarakat lebih memilih untuk melakukan transaksi perdagangan di exchanger luar negeri," ungkap Teguh, Minggu (27/3/2022).

AMBIGU

Kendati langkah Bappebti membentuk bursa kripto dapat disebut sebagai bentuk penerimaan secara konstitusional terhadap aset digital tersebut, nyatanya perbedaan pandangan masih terjadi di kalangan pengambil kebijakan.

Polemik pun muncul tatkala terdapat perbedaan sikap dan kebijakan antarregulator di Indonesia. Perdebatan itu berawal pada medio November 2021 lalu.

Kala itu, Asisten Gubernur BI Juda Agung mengkritik bahwa tidak seharusnya aset kripto dijadikan sebagai komoditi di Indonesia, lantaran disinyalir akan berdampak signifikan terhadap sistem keuangan.

Pernyataannya itu disampaikan dalam paparannya dengan Komisi I DPR saat melakukan uji kelayakan sebagai Deputi Gubernur BI. Pendapatnya terhadap aset kripto itu, didasarkan pada risiko penerimaan aset kripto yang akan berdampak signifikan terhadap sistem keuangan nasional.

> **"Transaksi Rp859 triliun kalau tidak ada *exchanger* di Indonesia, anak muda mau main di mana? Pasti di luar negeri.**

Dengan demikian, menurutnya pengawasan aset kripto yang berada di bawah Bappebti tidak tepat. Untuk itu, dia mengharapkan aset kripto sebagai komoditas dapat dikaji ulang dan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Respons lanjutan mengenai aset kripto pun muncul dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, bahwa pihaknya melarang lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi perdagangan aset kripto.

"OJK dengan tegas telah melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memasarkan, termasuk memfasilitasi perdagangan aset kripto," ujarnya.

Dalam hal ini OJK menilai aset kripto merupakan jenis komoditas yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga masyarakat harus paham risikonya. Dia juga meminta masyarakat berhat-hati terhadap potensi skema ponzi di investasi aset kripto. ◻

Bisnis/Dwitho Chrysnamurti
Investor memantau pergerakan harga kripto melalui ponselnya di Jakarta.

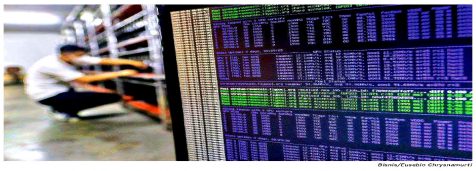
Bisnis/Dwitho Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas di Mining farm Rekeningku.com di Cibitung, Jawa Barat. Mining Farm yang telah berjalan sejak Oktober 2017 itu kini memiliki lebih dari 2,000 unit GPU dengan mayoritas menambang koin kripto Ethereum (ETH).